

**FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT IMPLEMENTASI KEGIATAN  
PROGRAM TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) DI KOTA  
SEMARANG**

Madva Lwihpakerti<sup>1)</sup>, Hartuti Purnaweni<sup>1,2)</sup>

<sup>1)</sup>Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial  
Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

<sup>2)</sup>Magister dan Doktor Ilmu Lingkungan, Sekolah Pasca  
Sarjana, Universitas Diponegoro  
Email : madvaluwi4@gmail.com

**ABSTRACT**

*One of the TNI's bhakti operations that directly touched the community's life needs was the TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), by involving the local government as a work partner. The TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) program took part in helping the Semarang City Government to help the community to be empowered, thereby improving the welfare of the community through physical and non-physical development. In this study using the theory of Edwards III to consider four factors in implementing public policy: Communication, Resources, Acting Attitudes, Bureaucratic Structure. Factors that are considered as supporting factors in the implementation of the TNI Manunggal Bangunan Desa (TMMD) program activities in Semarang City are the implementing communication and disposition. The factor that is considered as an inhibiting factor in the implementation of the TNI Manunggal Pembangunan Desa (TMMD) program activities in Semarang City is the resources and bureaucratic structure. The need to increase the quantity of human resources. The creation of a special SOP on the TMMD program so that operational implementation has a clear position base*

**Keywords : Implementation, Program, Resources, SOP**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Kemanunggalan TNI dengan rakyat harus selalu ditumbuhkembangkan dan dimantapkan secara terus menerus. Salah satu kegiatan operasi bhakti TNI yang langsung menyentuh kebutuhan hidup masyarakat adalah program TNI Manunggal Membangun Desa yang dikenal dengan sebutan TMMD, dengan melibatkan pemerintah daerah setempat selaku mitra kerja.

Sasaran TMMD meliputi obyek fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan produktifitas lahan pertanian, mengatasi kemungkinan bencana alam, banjir dan kepunahan hutan, pengentasan kemiskinan, pengentasan buta aksara, membantu pemerintah dalam hal kesehatan dan keluarga berencana. Obyek non fisik meliputi penyuluhan dan penerangan bela negara. Program TMMD akan mampu memperbaiki dan meningkatkan citra TNI di mata rakyat yang berarti persepsi positif masyarakat terhadap TNI pun akan semakin meningkat yang pada akhirnya integrasi dan sinergi atau kemanunggalan TNI dengan rakyat akan semakin kuat dan tangguh. Terwujudnya ini akan menjadikan elemen kunci bagi suksesnya pembinaan teritorial dan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan ketahanan wilayah (Purwatiningsih, Eny "Efektifitas Pelaksanaan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Dalam Mewujudkan Ketahanan Wilayah :130 - 138).

Dahulu program TMMD bernama ABRI Masuk Desa atau yang disebut AMD, tujuan AMD antara lain agar prajurit TNI dapat mengenal rakyat, mengetahui adat istiadat, budaya daerahnya dan rakyatpun dapat lebih mengenal dan memahami ABRI, sehingga potensi kemanunggalan TNI dengan rakyat dapat mendorong dan menggerakkan masyarakat ke arah perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan

bernegara, termasuk dalam mengatasi kemiskinan.

Upaya dalam menanggulangi kemiskinan secara konseptual dapat dilakukan oleh empat jalur strategis, yaitu perluasan kesempatan, pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial, dan peningkatan kapasitas. Strategi perluasan kesempatan ditujukan menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan. (Masrul Fuad : 2013)

Program ini dimaksudkan sebagai tanggapan terhadap kritik ikatan erat antara ABRI dan masyarakat desa yang saat itu tahun 1980-an sedang mengalami erosi. Menurut Setiowati dan Sumarno dalam artikel yang berjudul "Perkembangan ABRI Masuk Desa" dalam avatara , E Journal Pendidikan Sejarah (2015 : 101–114.) merenggangnya hubungan antara ABRI dengan rakyat ini disebabkan oleh semakin banyak dan tingginya posisi ABRI di dalam pemerintahan yang memunculkan sikap angkuh dan arogan di dalam tubuh personel ABRI, sehingga hubungan ABRI dan rakyat semakin jauh. Selain itu, ABRI Masuk Desa (AMD) juga dimaksudkan untuk meningkatkan citra ABRI serta memperkuat perannya sebagai sebuah organisasi yang berakar-dalam pada ikatan sosial negara ini. Selain itu, pengentasan kemiskinan perlu diselesaikan banyak pihak secara partisipatif (Murjana, 2008)

Perundang - undangan yang mendasari penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ini, yaitu : Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun

2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009.

Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ikut mengambil bagian dalam membantu Pemerintah Kota Semarang untuk membantu masyarakat agar diberdayakan, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan fisik maupun non fisik. Hal ini menarik sebagai kajian administrasi publik sehingga dalam penelitian ini akan di analisis mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kegiatan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kota Semarang.

### **Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kegiatan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kota Semarang

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Administrasi Publik**

Menurut Nicholas Henry (dalam Passolong 2008 : 7-8), administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik – praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik. Menurut Inu Kencana Syafiie dalam bukunya yang berjudul “*Ilmu Administrasi Publik*”, (2006 : 93) konsep administrasi publik itu terdiri dari Isu Pembangunan, Birokrasi Publik, Kebijakan Publik, dan Konsep Pelayanan Publik. Kebijakan publik merupakan salah satu konsep dari administrasi publik. Publik disini adalah masyarakat umum, yang selayaknya

diurus, diatur, dan dilayani oleh pemerintah sebagai administrator, tetapi kadang-kadang juga bertindak sebagai penguasa dalam pengaturan hukum tata negaranya. Menurut Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro mendefinisikan administrasi publik sebagai (1) suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan (2) meliputi tiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif, dan serta hubungan di antara mereka, (3) mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik, (4) sangat erat berkaitan dengan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat. (5) dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian administrasi perseorangan.

### **Kebijakan Publik**

Dalam kebijakan publik menurut Syafiie (2006:104 dalam Arifin 2014:20), kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Kamus Besar bahasa Indonesia kebijakan dijelaskan sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak. Kebijakan merupakan kata yang sangat sulit dikenal sehari – hari oleh masyarakat.

James E Anderson dalam Subarsono (2008 : 2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Dalam buku ini kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah di dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan,

ekonomi, politik, pertanian, industri, pertahanan dan sebagainya.

Kata kebijakan mempunyai konotasi yang berbeda dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan berasal dari kata *wisdom* yang pelaksanaannya membutuhkan pertimbangan – pertimbangan lebih jauh. Kebijakan berasal dari kata *policy* yang pelaksanaannya mencakup peraturan – peraturan di dalamnya dan sangat berkaitan dengan proses politik (Islamy, 2004:1.3 dalam Suwitri 2009:5). Carl J. Friedrich (Suwitri 2009:6) mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang di usulkan seseorang atau kelompok pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan – hambatan dan kesempatan – kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

### **Implementasi Kebijakan Publik**

Abdul Wahab (dalam Arifin 2014:55) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang – Undang, namun dapat bila berbentuk perintah – perintah atau keputusan – keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur / mengatur proses implementasinya. Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardjo, mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktek. Sedangkan Hinggis, mengartikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai tujuan implementasi itu berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. (Pasolong 2008, 57 – 58)

### **Model Implementasi Kebijakan.**

Edwards III (1980:9 dalam Arifin 2014:61), mengemukakan “*in our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: what are the predicondition for successful policy implementation? What are primary obstacles to successful policy implementation?*”. Setidaknya George C. Edwards III mengatakan bahwa di dalam pendekatan studi implementasi kebijakan pernyataan abstraknya dimulai dari bagaimana pra kondisi untuk suksesnya kebijakan publik dan kedua adalah apa hambatan utama dari kesuksesan kebijakan publik. Edwards III menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni: Komunikasi, Sumber Daya, Sikaelaksana, Struktur Birokrasi.

- a. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program / kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.
- b. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber

daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Wewenang di sini terkait dengan penggunaan wewenang secara efektif, karena tidak sedikit pelaksana kebijakan memiliki wewenang formal yang besar tetapi tidak digunakan sebagaimana mestinya. Para pelaksana mendapatkan fasilitas dan perlengkapan yang mereka butuhkan serta mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam penyediaan fasilitas tersebut. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program atau kebijakan.

- c. Struktur Birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui Standart Operating Procedure (SOP) yang di cantumkan dalam guideline program atau kebijakan.

Standart Operating Procedure (SOP) yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit, dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit – belit, panjang, dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program

secara cepat. (Dwiyanto 2009:31-33).

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif, informan mengarahkan peneliti untuk mengambil *locus* di kecamatan Gunung Pati. Penentuan subjek penelitian menggunakan key person yaitu dari Kodim 0733/Semarang, Sekretariat Daerah Kota Semarang Bagian Tata Pemerintahan, Bappeda Kota Semarang Bagian Perencanaan Sosial dan Budaya, Kecamatan Gunung Pati dan masyarakat kelurahan Patemon dan Pakintelan yang berjumlah satu orang per kelurahan, dilihat dari masyarakat yang menerima bantuan program TMMD dengan saran dari pihak kelurahan. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menurut Miles dan Huberman (Sugiyono 2010:247-252) , antara lain reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **FENOMENA PENELITIAN**

Fenomena penelitian faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kegiatan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kota Semarang mengacu pada 4 hal yaitu :

1. Komunikasi  
Komunikasi meliputi Konsistensi informasi dalam melaksanakan program TMMD di Kota Semarang, transmisi informasi dalam melaksanakan program TMMD di Kota Semarang, serta kejelasan informasi dalam melaksanakan program TMMD di Kota Semarang
2. Sumber Daya  
Sumber daya dalam fenomena penelitian ini yaitu sumber daya

manusia para pelaksana program TMMD di Kota Semarang meliputi kuantitas dan kualitas pegawai, fasilitas yang ada dalam pelaksanaan kebijakan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Fasilitas seperti sarana dan prasana seperti fasilitas fisik ketersediaan peralatan kantor atau fasilitas non fisik seperti bentuk latihan kepada implementor dapat menentukan keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan, dan wewenang yang ada dalam pelaksanaan kebijakan terkait dengan penggunaan wewenang secara efektif dari memberi bantuan sampai memaksakan perilaku

### 3. Disposisi

Disposisi berupa komitmen para pelaksana program TMMD di Kota Semarang, serta sikap kejujuran para pelaksana program TMMD di Kota Semarang

### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dilihat dari ketersediaan SOP (*standard operating procedure*) untuk melaksanakan program TMMD di Kota Semarang, serta kejelasan SOP (*standard operating procedure*) untuk melaksanakan program TMMD di Kota Semarang

## HASIL PENELITIAN

### Komunikasi

Transmisi berkaitan erat dengan bagaimana penyaluran perintah yang dibuat dan perintah tersebut untuk pelaksanaannya telah ditetapkan sebelum akhirnya pejabat tersebut mengimplementasikan kebijakan / program, penyaluran informasi ketika rapat dapat diterima oleh semua pihak yang terkait dalam program TMMD

dan dapat menyesuaikan kebutuhan saat pelaksanaan program TMMD, selain melalui rapat penyaluran informasi juga melalui pesan singkat jika ada informasi yang mendadak. Kejelasan informasi erat kaitannya dengan keutuhan informasi yang jelas, akurat dan tidak ambigu. masyarakat dan pihak – pihak pendukung program TMMD dapat mengerti kegiatan – kegiatan saat program TMMD serta lokasi yang akan dilaksanakan program TMMD. Konsistensi informasi berkaitan dengan informasi yang diterima dapat konsisten serta tidak berubah-ubah saat informasi tersebut diterima oleh sasaran kebijakan dapat diketahui dari seringnya pihak – pihak yang terkait dalam program TMMD berkoordinasi dan sudah lama program TMMD dilaksanakan di Kota Semarang.

### Sumber Daya

Sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan program TMMD dapat berupa kuantitas dan kualitas pegawai lingkungan internal, fasilitas kantor yang dipergunakan serta wewenang yang digunakan.

Kuantitas dan kualitas pegawai kekurangan jumlah pegawai ini dapat menghambat pelaksanaan program TMMD itu sendiri, seperti pelaksanaan kegiatan – kegiatan TMMD menjadi tidak sesuai rencana atau bahkan lebih lama dari yang sudah dijadwalkan. kewenangan yang dilaksanakan diprogram TMMD hanya berupa pelaksanaan tugas sesuai dengan tupoksi masing – masing instansi, selain itu para pelaksana program TMMD kurang tegas dalam mengajak instansi perangkat daerah lain dan masyarakat untuk berpartisipasi diprogram TMMD.

### Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka ia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Disposisi dari program TMMD di Kota Semarang yang mencakup komitmen dan kejujuran dari para pelaksana sudah cukup baik, dapat dilihat dari komitmen para pelaksana menjalankan program TMMD dengan sungguh – sungguh agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu cara menumbuhkan sikap kejujuran dengan melakukan pengawasan saat penganggaran dan pelaksanaan dapat terhindar dari tindak kecurangan yang dapat merugikan semua pihak.

### **Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi yang bertugas memimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dalam setiap organisasi adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). Pelaksanaan kegiatan program TMMD di Kota Semarang dari pihak pemerintah menyatakan, selama pelaksanaan program TMMD tidak ada SOP secara tertulis karena pemerintah sudah mengerti tugas dan fungsi masing – masing instansi pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan program TMMD. Dari pihak Kodim mengemukakan bahwa SOP untuk melaksanakan program TMMD ditentukan oleh Penanggung Jawab Operasional (PJO) dari atasan.

### **PEMBAHASAN**

### **Komunikasi**

Transmisi yang dilakukan oleh pihak – pihak terkait program TMMD untuk menyampaikan informasi melalui rapat koordinasi, penyaluran informasi melalui rapat koordinasi mampu diterima oleh pelaksana program TMMD dalam keadaan mendesak penyaluran informasi dilakukan melalui pesan singkat seperti sms dan Whats app.

Kejelasan informasi pihak – pihak yang terkait program TMMD dapat mengerti tentang informasi yang telah diberikan, menurut para informan hal tersebut karena mereka sering melakukan rapat koordinasi sehingga informasi tersebut jelas dan dapat dipahami oleh pihak – pihak terkait program TMMD. Masyarakat sebagai sasaran program dapat menerima informasi dengan jelas, baik itu mengenai bentuk bantuan ataupun waktu dari pelaksanaan kegiatan tersebut.

Konsistensi dari pelaksanaan kegiatan program TMMD di Kota Semarang dengan rutusnya pihak – pihak yang terkait melakukan rapat koordinasi dan pelaksanaan dari program TMMD sudah berjalan sejak bernama ABRI Masuk Desa (AMD) hingga saat ini.

### **Sumber Daya**

Jumlah personel untuk melaksanakan program TMMD masih kurang, dikarenakan tentara harus siap jika dibutuhkan oleh atasan ketika ada keadaan mendesak seperti kejahatan atau bencana alam tentara dituntut untuk sigap dalam memberikan bantuan saat masyarakat membutuhkan bantuan. Sedangkan untuk kualitas pegawai sendiri cukup baik karena setiap tentara tidak hanya dibekali ilmu tentang perang tetapi juga ilmu diluar perang seperti tukang

guna melaksanakan program TMMD terutama untuk kegiatan fisik.

Sumber daya fasilitas yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan program TMMD di lingkungan internal sudah cukup memadai. Fasilitas komputer, ruangan serta AC untuk rapat koordinasi maupun membuat laporan pertanggung jawaban program dirasa sudah cukup menunjang untuk melaksanakan program TMMD. Namun disisi lain terdapat kendala pada ketersediaan alat – alat untuk melaksanakan kegiatan fisik.

Kewenangan yang dilaksanakan diprogram TMMD hanya berupa pelaksanaan tugas sesuai dengan tupoksi masing – masing instansi, selain itu para pelaksana program TMMD kurang tegas dalam mengajak instansi perangkat daerah lain dan masyarakat untuk berpartisipasi diprogram TMMD.

### **Disposisi**

Disposisi implementor dalam pelaksanaan program TMMD di Kota Semarang mengenai komitmen yang dilakukan oleh implementor dapat dilihat dari adanya upaya dari pemerintah Kota Semarang dan Kodim untuk melaksanakan program TMMD secara sungguh – sungguh agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Cara menumbuhkan sikap kejujuran yaitu dengan melakukan pengawasan dari penganggaran sampai pelaksanaan agar implementor melaksanakan program TMMD sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, selain itu Kodim mempunyai cara tersendiri untuk menumbuhkan sikap kejujuran dengan memberi motivasi langsung dari Dandim kepada tentara yang akan melaksanakan program TMMD dilapangan

### **Struktur Birokrasi**

SOP untuk pelaksanaan program TMMD hanya dimengerti oleh pihak Kodim, karena SOP tersebut berasal dari Kepala Staff TNI Angkatan Darat (KASAD) selaku Penanggung Jawab Operasional (PJO) melalui buku tata cara pelaksanaan program TMMD. Secara garis besar buku tersebut berisi tahap perencanaan, survey sasaran, koordinasi dengan pemerintah Kota atau Kabupaten, persiapan material, dan persiapan prajurit guna pelaksanaan dilapangan serta menjaga keamanan dilapangan. Tetapi disisi lain pihak pemerintah belum mengerti tentang adanya SOP tertulis untuk melaksanakan program TMMD tidak ada, selama pelaksanaan program TMMD pemerintah tidak ada SOP secara tertulis.

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Faktor yang dianggap sebagai faktor pendukung dalam implementasi kegiatan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kota Semarang, yaitu komunikasi, berkaitan dengan transmisi penyaluran informasi melalui rapat koordinasi dan pesan singkat, kejelasan informasi dengan seringnya para pelaksana melaksanakan rapat koordinasi membuat informasi yang ada pada program TMMD tidak membingungkan, konsistensi informasi dari kegiatan program TMMD di Kota Semarang berjalan konsisten karena program tersebut sudah berjalan ketika program TMMD masih bernama AMD. Sedangkan disposisi pelaksana berkaitan dengan komitmen, kegiatan program TMMD mempunyai komitmen menjalankan dengan sungguh – sungguh supaya kegiatan tersebut dapat dirasakan



langsung oleh masyarakat, selanjutnya sikap kejujuran cara menumbuhkannya dengan melakukan pengawasan sejak perencanaan hingga pelaksanaan selain itu dari pihak Kodim melakukan motivasi kepada anggota TNI yang melaksanakan program TMMD.

Faktor yang dianggap sebagai faktor penghambat dalam implementasi implementasi kegiatan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kota Semarang adalah sumber daya dan struktur birokrasi. Sumber daya meliputi kualitas dan kuantitas pegawai, dengan minimnya kuantitas pegawai dapat menghambat pelaksanaan kegiatan program TMMD, selanjutnya wewenang pemerintah ataupun pihak TNI dalam tidak memaksa masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan program TMMD. Faktor penghambat kedua yaitu struktur birokrasi, tidak adanya SOP tertulis dari pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan program TMMD.

### **Saran**

Perlunya peningkatan kuantitas sumber daya manusia guna mendukung pelaksanaan program TMMD, selain itu perlunya pemerintah meningkatkan sumber daya finansial agar lebih banyak masyarakat yang kurang mampu dapat menerima bantuan. Serta dibuatnya SOP khusus tentang program TMMD agar pelaksanaan operasional memiliki dasar kedudukan yang jelas.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Fuad Masrul, Suwitri, Sulandari. (2013). *Strategi Pemberdayaan Kelompok Pengemis Gelandangan Orang Terlantar (Pgot) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Dinas Sosial, Pemuda,*

*Dan Olahraga Kota Semarang*. Jurnal Administrasi Publik Vol 2. Nomor 4. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro.

Indihono, Dwiyantno. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.

Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV Alfabeta.

Purwatiningsih Eny. (2013). *Efektifitas Pelaksanaan Program Tni Manunggal Membangun Desa ( TMMD) Dalam Mewujudkan Ketahanan Wilayah*. Jurnal Ketahanan Nasional. Nomor XIX (3), 130 – 138.

Setiowati, I. N., & Sumarno. (2015). *Perkembangan ABRI Masuk Desa*. AVATARA, *E-Journal Pendidikan Sejarah*, 3(1), 101–114.

Sugiyono. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suwitri. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Peenerbit Universitas Diponegoro.

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi*. Bandung: Alfabeta.

